

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, sebagai dampak perubahan yang terjadi menuntut perangkat daerah untuk membuka pikirannya terhadap perubahan yang terus berkembang dalam upaya untuk menyusun strategi dan kebijakan yang selaras dengan perubahan lingkungan yang akan bergantung pada kemampuan kinerja individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu, suatu kinerja individu harus mampu untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan selalu berupaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

Kinerja individu akan mempengaruhi perangkat daerah secara keseluruhan karena keberhasilan individu akan mengukur keberhasilan dari suatu perangkat daerah yang ada. Perkembangan yang menuntut kinerja individu untuk tetap bertahan dalam persaingan yang mengharuskan perusahaan menunjukkan kinerja yang baik, maka pihak manajemen merasa perlu untuk mengukur kemampuannya dan menggunakan peluang tersebut serta mampu untuk mengumpulkan permasalahan dan mensortir untuk melaksanakan proses adaptasi dengan baik. Kinerja individu akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mempertahankan kelangsungan organisasi serta mengendalikan perusahaan (Anggraini, 2011).

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai salah satu tolak ukur kinerja pegawai yang berujung pada peningkatan dan optimalisasi kinerja pegawai tiap tahunnya.

Mangkunegara A. P (2009, hlm. 9) mendefinisikan kinerja karyawan (prestasi kerja) sebagai "Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Sebagaimana disebutkan diatas kinerja karyawan

adalah hal yang dapat berjalannya tugas organisasi dalam pelaksanaannya untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini tentu diperlukan usaha untuk menjamin kinerja pegawai disuatu organisasi dapat berjalan dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang biasa disingkat BAPPEDA, merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang peneliti fokuskan pada karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Unit Kerja	Target Sasaran Kinerja (%)	Penilaian Kinerja (%)		
			2020	2021	2022
1	Sekretariat	100	88,45	90,17	90,55
2	Bidang PPEPD		89,34	90,24	90,24
3	Bidang PPM		88,14	89,01	89,78
4	Bidang Infraswil		88,25	89,04	90,04
5	Bidang PSDA		88,67	88,78	88,68
Rata-rata			84,86	88,57	89,45

Sumber: Unit Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, skor penilaian hasil kinerja karyawan di setiap unit sudah masuk kedalam kategori baik, namun belum ada yang mencapai target sasaran yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya sasaran kinerja karyawan belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dari karyawan itu sendiri maupun dari pihak pimpinan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Berikut merupakan kriteria nilai yang dipakai sebagai acuan dalam penilaian kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa

Barat yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS :

Tabel 1.2
Standar Nilai Prestasi Kerja

Kriteria Nilai	Kategori	Keterangan
91 – 100	Sangat Baik	Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain.
76 – 90	Baik	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
61 – 75	Cukup	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan, dan lain-lain.
51 – 60	Kurang	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
50 ke Bawah	Buruk	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011

Kinerja individu juga akan diatur melalui kesesuaian kinerja manajemen dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Adanya penugasan-penugasan terhadap individu didalam perusahaan tau organisasi harus disesuaikan dengan pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan wewenang. Hal ini terbukti bahwa keberlangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk bersaing di pasar. Artinya, kemampuan bersaing inilah diperlukan strategi yang dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta dapat menutupi celah daripada kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam kekuatan bisnis yang sedang dihadapi.

Sejalan dengan hal tersebut, Mangkunegara (2016) berpendapat bahwa istilah job performance atau kinerja merupakan hasil dari kerja seseorang tentang

apa yang telah dicapainya. Lebih lanjut, kinerja juga dapat diartikan sebagai bentuk dari tanggung jawab yang telah dikerjakannya dalam pekerjaannya sehingga dapat disebut dengan pencapaiannya selama bekerja. Secara teori terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Menurut Simanjuntak, (2005, hlm. 117) mengemukakan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain: 1) Kualitas dan kemampuan pegawai; 2) Sarana pendukung; dan 3) Supra sarana. Menurut (Sedarmayanti, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :1) Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), 2) Pendidikan, 3) Keterampilan, 4) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat penghasilan, 6) Gaji dan kesehatan, 7) Jaminan sosial, 8) Iklim kerja, 9) Sarana dan prasarana, 10) Teknologi, dan 11) Kesempatan berprestasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat merupakan badan yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dimana dalam hal ini sangat membutuhkan data-data informasi dan arsip sebagai bahan perencanaan pembangunan. Karena Badan ini memiliki tugas melaksanakan penyusunan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses kegiatannya membutuhkan data-data dan informasi yaitu arsip sebagai bahan perencanaan pembangunan. Karena dari data-data dan informasi tersebut akan dapat diketahui rencana pembangunan apa saja yang akan di jalankan, sehingga keputusan yang diambil pimpinan akan tepat sasaran.

Terdapat diantaranya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu penggunaan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya ini tentu karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat perlu memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan seperti mengolah data, memproses hal-hal yang saling berhubungan dengan pekerjaan yang mana dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan serta efisien dalam pekerjaan.

Dalam pengelolaan arsip agar informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dapat tersampaikan maka diperlukan adanya sistem informasi kearsipan. Kelengkapan sistem informasi memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu

organisasi. Selain itu, juga fapat meningkatkan efektivitas dan aktifitas dalam pekerjaannya. Dalam hal bekerja, pekerjaan yang awalnya dikerjakan secara manual, baik itu pekerjaan yang dikerjakan secara tulis-menulis ataupun dengan pekerjaan yang dikerjakan secara pengetikan yang menggunakan mesin ketik, beralih menjadi pengerjaan menggunakan komputerisasi dan internet.

Sistem informasi adalah gabungan komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah, menyimpan dan menghasilkan informasi. Sistem informasi berfungsi sebagai sarana dalam menyediakan informasi secara cepat dan tepat bagi kepentingan suatu lembaga. Kehadiran sistem informasi merupakan bentuk dari meningkatnya kebutuhan informasi pengguna. Salah satu pihak yang berperan sebagai penyedia informasi adalah bidang kearsipan. Sistem informasi dimanfaatkan bidang kearsipan untuk membantu dalam pengelolaan arsip dinamis (Iksaningtyas, 2020).

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau yang biasa penulis singkat dengan SIKD adalah aplikasi elektronik berbasis manajemen arsip dinamis untuk praktek perkantoran yang berbasis web. Aplikasi ini dilegalisasi dengan terbitnya Perka ANRI nomor 15 tahun 2009 tentang Aplikasi SIKD dan SIKS. SIKD diberikan secara gratis kepada Kementrian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN. SIKD ini diadopsi dari ANRI dan digunakan di lingkungan internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun pada tahun 2021 terdapat pergantian nama menjadi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Jawa Barat Juara (SIMANIS JUARA) dan mengalami perubahan nama kembali menjadi Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat (SIDEBAR) pada tahun 2022.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat (BAPPEDA) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara hybrid baik konvensional maupun elektronik. Pengelolaan arsip secara elektronik dilakukan melalui penggunaan Sistem Dokumen Elektronik (SIDEBAR). Tentunya melalui penerapan SIDEBAR di BAPPEDA ini yang dimana setiap harinya banyak surat yang masuk dan keluar, SIDEBAR ini tentu membantu dalam mengolah arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif.

Penggunaan SIDEBAR ini didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu didukung dengan adanya kecepatan data dan informasi berupa tata naskah dinas secara elektronik.

Dalam perkembangannya instansi ini selalu dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan atau mutu kerjanya. Alasan yang mendasari dilakukannya penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah untuk mengetahui seberapa banyak pengaruh sistem informasi dokumen elektronik bagi kinerja karyawan.

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Sistem Informasi Dokumen Elektronik Terhadap Kinerja Karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat".

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Keberhasilan sebuah sistem dapat diukur dengan kinerja yang dicapai oleh seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melakukan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, hal tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada pengelolaan suatu perusahaan, tetapi memberikan pengaruh signifikan pada sistem teknologi informasi.

Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi serta didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan kinerja perusahaan dengan menghasilkan output yang tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya.

Masalah kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat khususnya dalam penggunaan sistem informasi dokumen elektronik merupakan aspek penting yang perlu untuk diperhatikan guna menciptakan lingkungan kerja yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pendekatan tertentu terhadap penggunaan sistem informasi dokumen elektronik dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya: 1) Kualitas dan kemampuan pegawai; 2) Sarana pendukung; dan 3) Supra sarana. Menurut (Sedarmayanti, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 1) Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), 2) Pendidikan, 3) Keterampilan, 4) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat penghasilan, 6) Gaji dan kesehatan, 7) Jaminan sosial, 8) Iklim kerja, 9) Sarana dan prasarana, 10) Teknologi, dan 11) Kesempatan berprestasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membatasi penelitian dengan faktor teknologi yang dimanfaatkan dalam pekerjaan. Sehingga permasalahan yang akan diteliti meliputi penggunaan sistem informasi dokumen elektronik terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan dan keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya yang memungkinkan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran efektivitas penggunaan sistem informasi dokumen elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana gambaran tingkat kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh sistem informasi dokumen elektronik terhadap kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan melakukan kajian yang lebih dalam mengenai penggunaan sistem informasi dokumen elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi dokumen elektronik terhadap kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Sedangkan, secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran efektivitas penggunaan sistem informasi dokumen elektronik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi dokumen elektronik terhadap kinerja karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat?

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menurut Kristanto (2018, hlm. 44) kegunaan teoritis merupakan suatu manfaat dari hasil penelitian yang dapat digunakan secara teoritis. Adapun kegunaan secara teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Perkembangan Sistem Informasi Kearsipan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi Kearsipan, khususnya Sistem Informasi Dokumen Elektronik Terhadap Kinerja Karyawan, serta sebagai bahan perbandingan antara praktek nyata dan teori.

2. Kegunaan Praktis

Menurut Kristanto (2018, hlm. 44) kegunaan praktis merupakan suatu kegunaan atau manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dapat digunakan atau dapat diterapkan langsung pada ilmu tertentu. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti dalam mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Dokumen Elektronik Terhadap Kinerja Karyawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

2) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat untuk memperhatikan lebih dalam tentang implementasi sistem informasi dokumen elektronik yang dirasakan masih kurang sehingga dapat ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan, khususnya terkait dengan sistem informasi dokumen elektronik.

3) Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang sistem informasi dokumen elektronik dan implementasinya di organisasi perangkat daerah. Selain itu, mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang implementasi sistem informasi dokumen elektronik dari sudut pandang lain.